



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

**PUSAT KEBIJAKAN SISTEM KETAHANAN KESEHATAN DAN  
SUMBER DAYA KESEHATAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Wirabrata, Apt  
Jabatan : Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan  
Sumber Daya Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syarifah Liza Munira  
Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

**Syarifah Liza Munira**

Pihak Pertama

**Dr. Wirabrata, Apt**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PUSAT KEBIJAKAN SISTEM KETAHANAN KESEHATAN DAN**  
**SUMBER DAYA KESEHATAN**

|     | <b>Sasaran Program/Kegiatan</b>  | <b>Indikator Kinerja</b>   | <b>Target</b> |
|-----|--|--|---------------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)           |
| 1.  | Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti | 1. Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti  | 75            |
|     |  | 2. Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti  | 75            |
|     |  | 3. Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti                                       | 75            |
|     |  | 4. Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan dibidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan | 80            |
|     |  | 5. Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi Kesehatan  | 50            |
| 2.  | Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya                       | 1. Persentase Realisasi Anggaran BKPK  | 95            |

| <b>Kegiatan</b>  |    | <b>Anggaran</b>        |
|--|----|------------------------|
| 1. Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan                    | Rp | 137.738.888.000        |
| 2. Dukman pelaksanaan program di BKPK  | Rp | 15.378.691.000         |
| Total Anggaran Unit Kerja Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan | Rp | <b>153.117.579.000</b> |

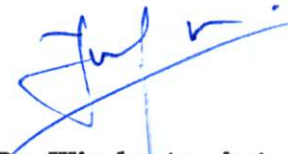
Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,



**Syarifah Liza Munira**

Pihak Pertama



**Dr. Wirabrata, Apt**